



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sinergi untuk Indonesia Maju



PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE UNTUK KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

DASAR HUKUM *E-GOV & SPBE*

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003
tentang **Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan *E-Government***



Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2018

DEFINISI SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
adalah **penyelenggaraan pemerintahan** yang
memanfaatkan **teknologi informasi dan komunikasi**
untuk **memberikan layanan** kepada pengguna SPBE.



Sinergi untuk Indonesia Maju

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

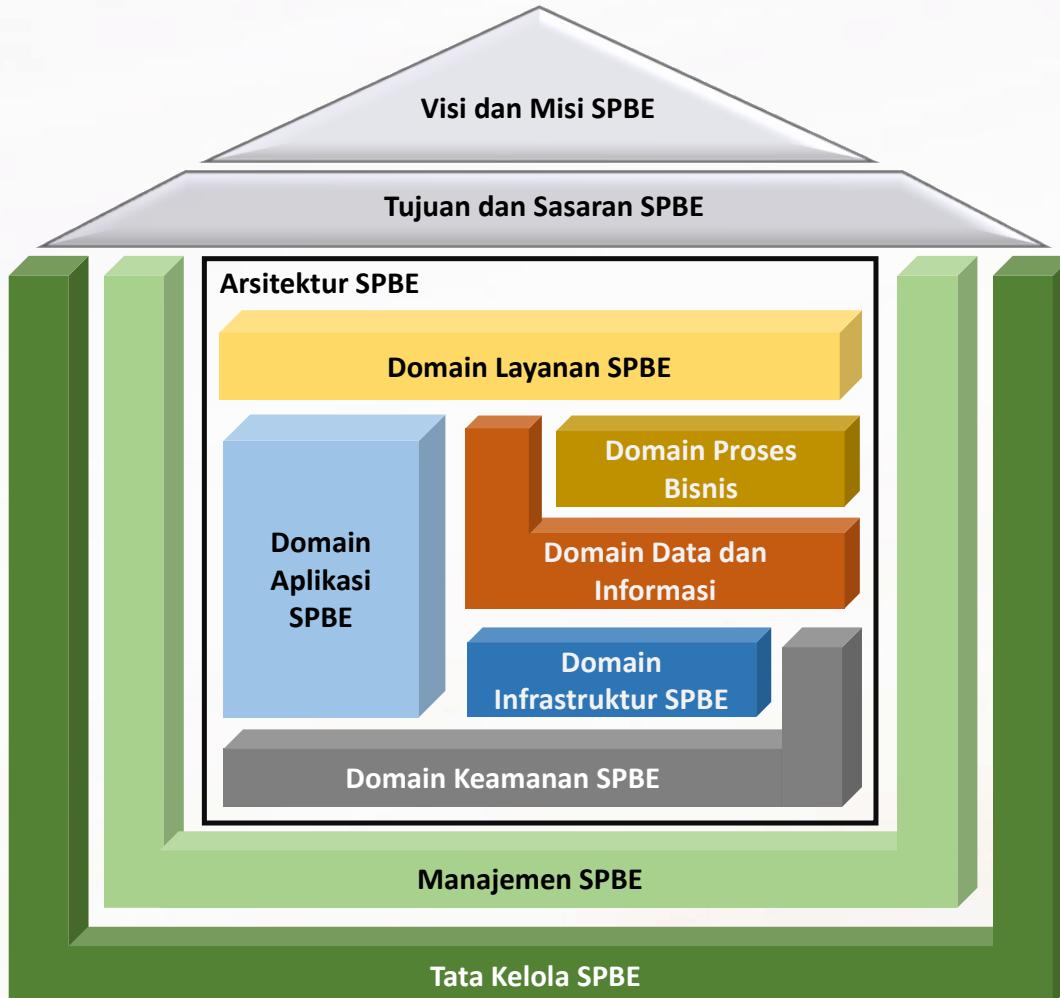
Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan **Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional** dibentuk **Tim Koordinasi SPBE Nasional.** *[Pasal 59 ayat (1) Perpres 95/2018 tentang SPBE]*



Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan **koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
[Pasal 59 ayat (3) Perpres 95/2018 tentang SPBE]

Sinergi untuk Indonesia Maju

ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE



DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

JANGKA WAKTU

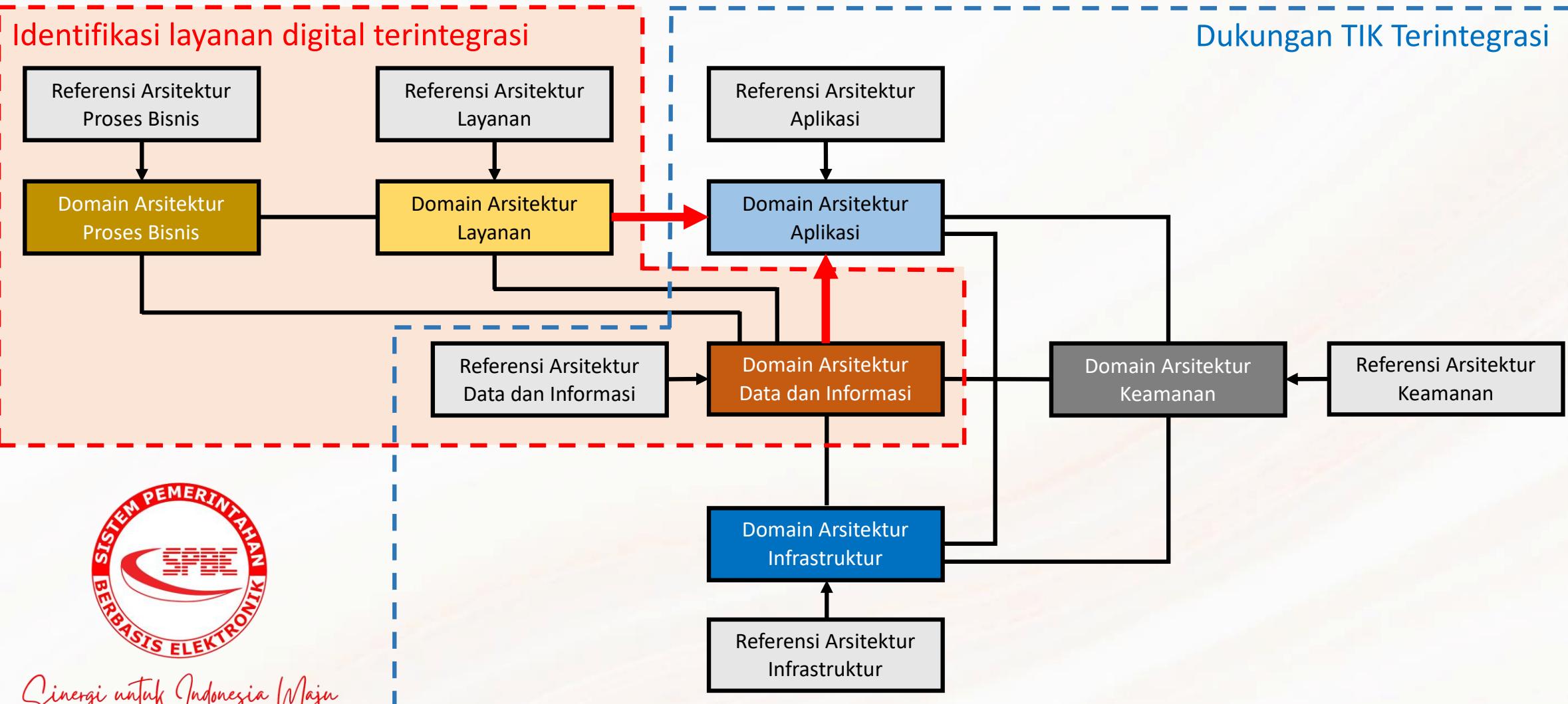
Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

TERDIRI DARI

- Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)
- Arsitektur SPBE Instansi Pusat
- Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Sinergi untuk Indonesia Maju

KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



INSTANSI PENGAMPU MASING-MASING DOMAIN ARSITEKTUR SPBE



DOMAIN
PROSES BISNIS

DOMAIN
LAYANAN SPBE



Kementerian PPN/
Bappenas

DOMAIN DATA
& INFORMASI



KEMKOMINFO

DOMAIN
APLIKASI SPBE

DOMAIN
INFRASTRUKTUR
SPBE

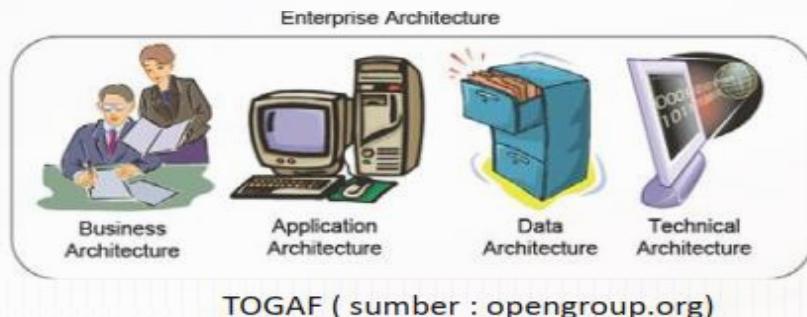


DOMAIN
KEAMANAN
SPBE

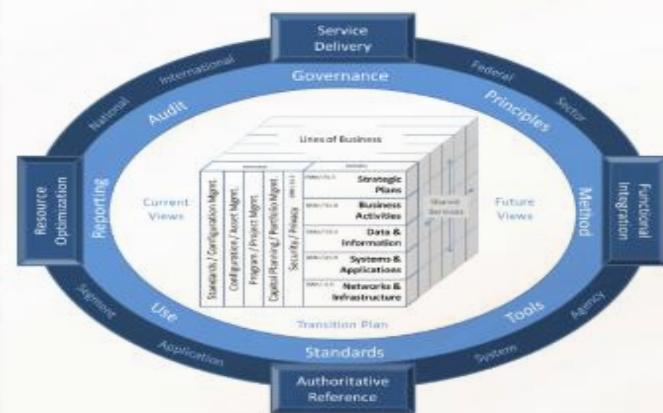
Sinergi untuk Indonesia Maju

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi, sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.



TOGAF (sumber : opengroup.org)



FEAF (sumber : CIO, 2012)

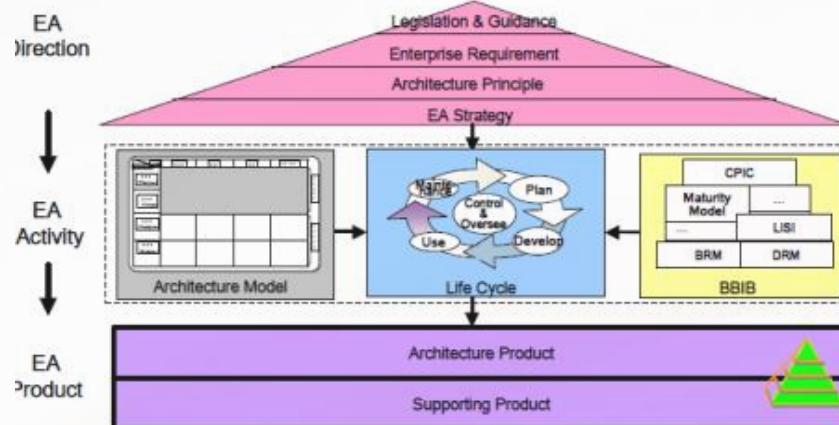
The Zachman Framework for Enterprise Architecture™
The Enterprise Ontology™



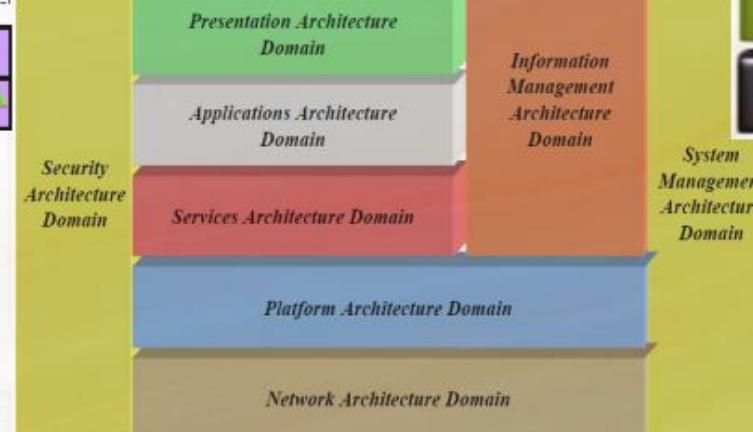
ZACHMAN v.3 (sumber :www.zifa.com)

ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

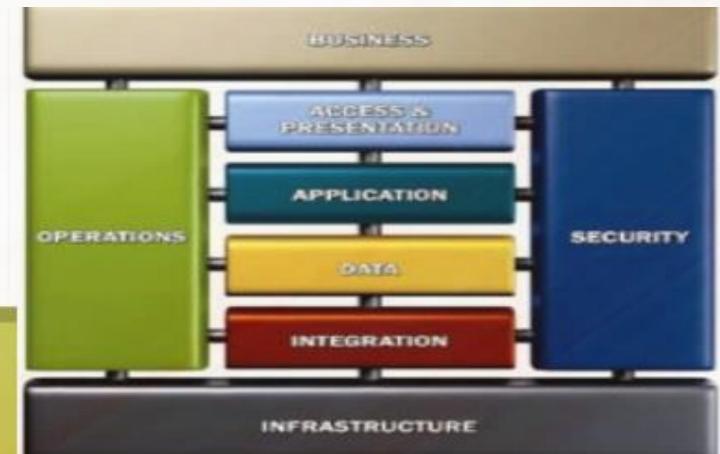
Pada umumnya setiap negara menyusun **Government Enterprise Architecture (GEA)** sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan secara spesifik.
GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.



GEAF (Korea) Sumber : song, hee joon, 2006



Canada, Sumber : Weisman, 2004



Abu Dhabi IT A&S Framework, Sumber :
Abu Dhabi SIC, 2013

BAGAIMANA ARSITEKTUR SPBE AKAN MENGINTEGRASIKAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (ILUSTRASI)

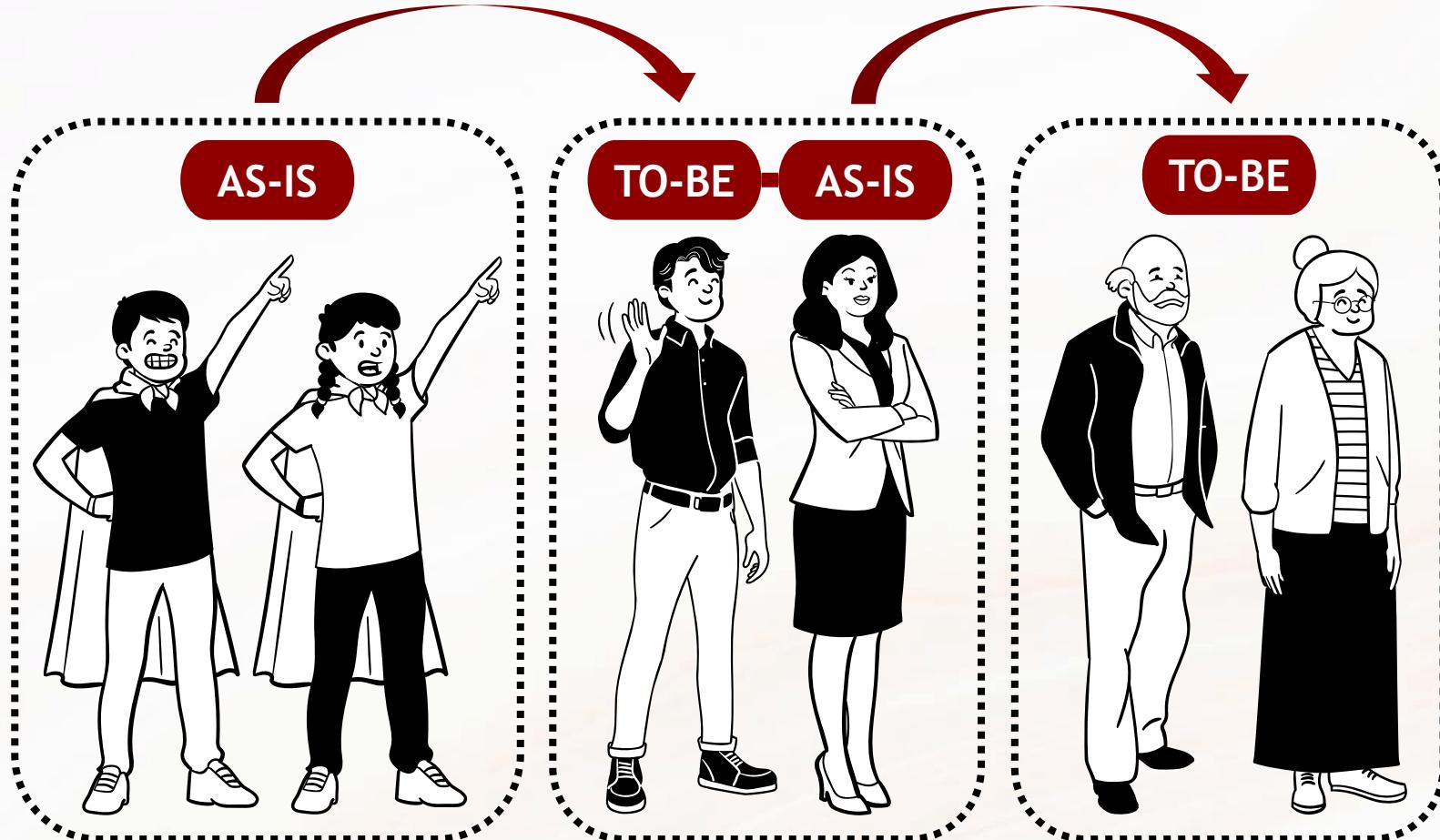


MASYARAKAT
MEMANDANG PEMERINTAH
SEBAGAI SATU KESATUAN

KETERHUBUNGAN ANTAR-INSTANSI

ASN MELAYANI TANPA
TERBATAS PADA SEKAT
STRUKTUR INSTANSI

PERSONAL/INDIVIDUAL ARCHITECTURE (ANALOGI)



VISI/CITA-CITA:
KESEHATAN, PENDIDIKAN,
FINANSIAL

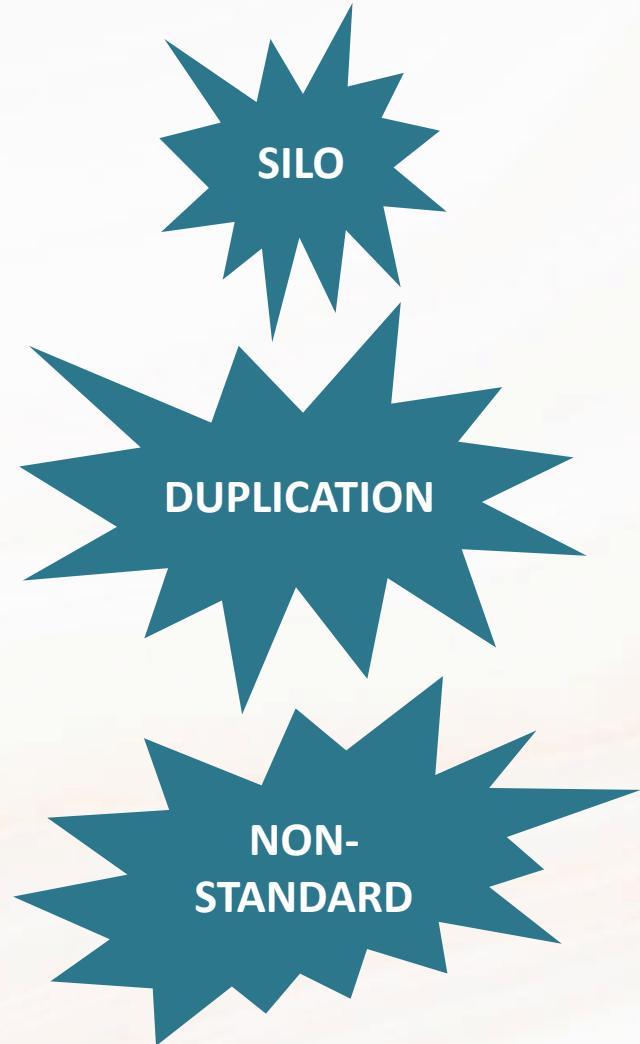
olahraga,
menjaga
pola makan,
& pola tidur

belajar
mandiri &
mengikuti
pelatihan

menghemat
& bekerja
dengan giat

CONTOH DUKUNGAN TIK:
*gadget (handphone, tablet,
smartwatch, laptop), aplikasi,
dan lain-lain.*

TANPA ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)

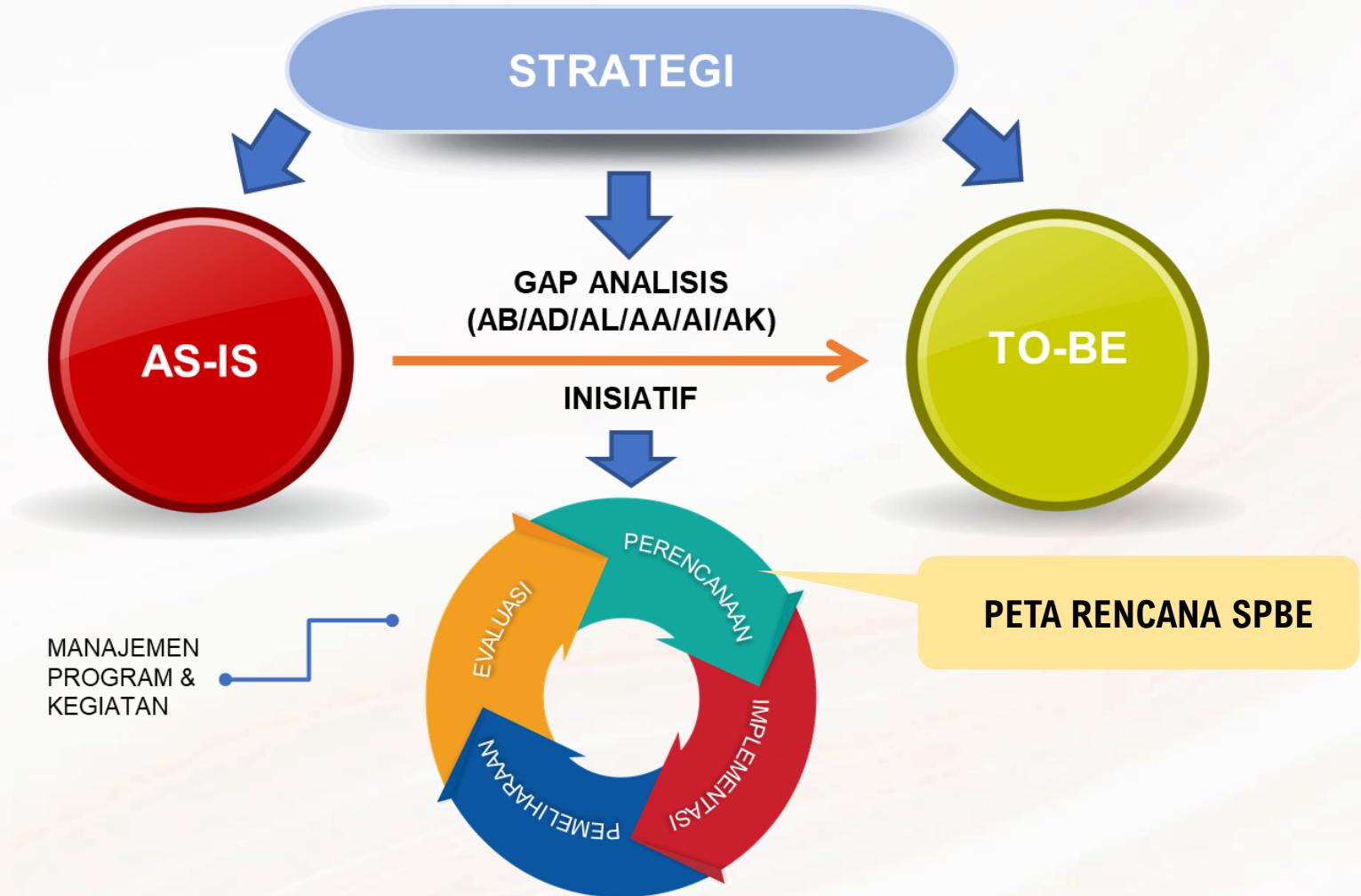


DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)



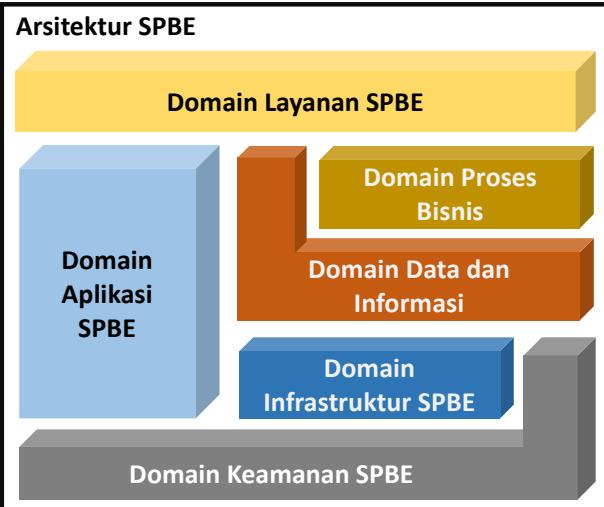
Sinergi untuk Indonesia Maju

ARSITEKTUR SPBE & PETA RENCANA SPBE



APA YANG HARUS DISUSUN OLEH INSTANSI PUSAT & PEMERINTAH DAERAH

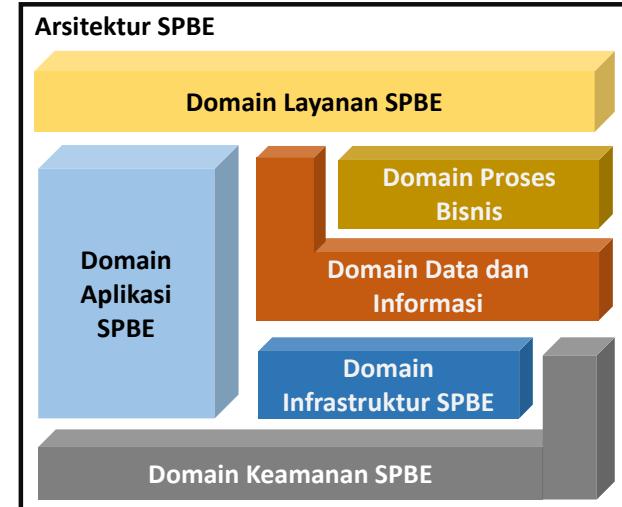
DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (AS-IS)



DOKUMEN PETA RENCANA SPBE

Tata Kelola SPBE
Manajemen SPBE
Layanan SPBE
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan SPBE
Audit TIK

DOKUMEN ARSITEKTUR SPBE (TO-BE)





Surat Edaran Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE



Dimaksudkan sebagai arahan yang mendorong IPPD untuk melakukan penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dasar penerapan SPBE pada lingkup IPPD masing-masing.

Bertujuan untuk memastikan keterpaduan penerapan SPBE di tingkat instansi pusat, pemerintah daerah, maupun nasional, guna terwujudnya layanan digital nasional yang terpadu sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pemerintah, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL.



**PERPRES 132/2022 TENTANG
ARSITEKTUR SPBE NASIONAL
TELAH DITETAPKAN OLEH
PRESIDEN JOKO WIDODO PADA
20 DESEMBER 2022**

Arsitektur SPBE Nasional memuat:

1. Arah kebijakan dan strategi;
2. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional;
3. Referensi Arsitektur SPBE Nasional;
4. Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan
5. Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Nasional.



MAKSUD DAN TUJUAN DISUSUNNYA ARSITEKTUR SPBE

- Memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional.
- Mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi.

Sinergi untuk Indonesia Maju

3 KOMPONEN PENYUSUN ARSITEKTUR SPBE

Metadata Arsitektur



Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya



Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep, relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.



Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata

Referensi Arsitektur



Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.



Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya



Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan

Domain Arsitektur



Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur



Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area



Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan



REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

DEFINISI: kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain Arsitektur SPBE. [Pasal 1 angka 6 Perpres 132/2022]

- | | |
|--|-------|
| 1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis | → RAB |
| 2. Referensi Arsitektur Layanan SPBE | → RAL |
| 3. Referensi Arsitektur Data & Informasi | → RAD |
| 4. Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE | → RAA |
| 5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE | → RAI |
| 6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE | → RAK |



DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

DEFINISI: kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| domain arsitektur proses bisnis, | → DAB |
| domain arsitektur data dan informasi, | → DAD |
| domain arsitektur infrastruktur SPBE, | → DAI |
| domain arsitektur aplikasi SPBE, | → DAA |
| domain arsitektur keamanan SPBE, dan | → DAK |
| domain arsitektur layanan SPBE. | → DAL |

[Pasal 1 angka 7 Perpres 132/2022]



METADATA ARSITEKTUR SPBE

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditaegarkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	Unit Kerja (Dependency)	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)

METADATA

DEFINISI METADATA BERDASARKAN PERPSPEKTIF SATU DATA INDONESIA:

informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencairan, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

[Pasal 1 angka 7, Perpres 39/2019 tentang Satu Data Indonesia]

SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR (SIA) SPBE

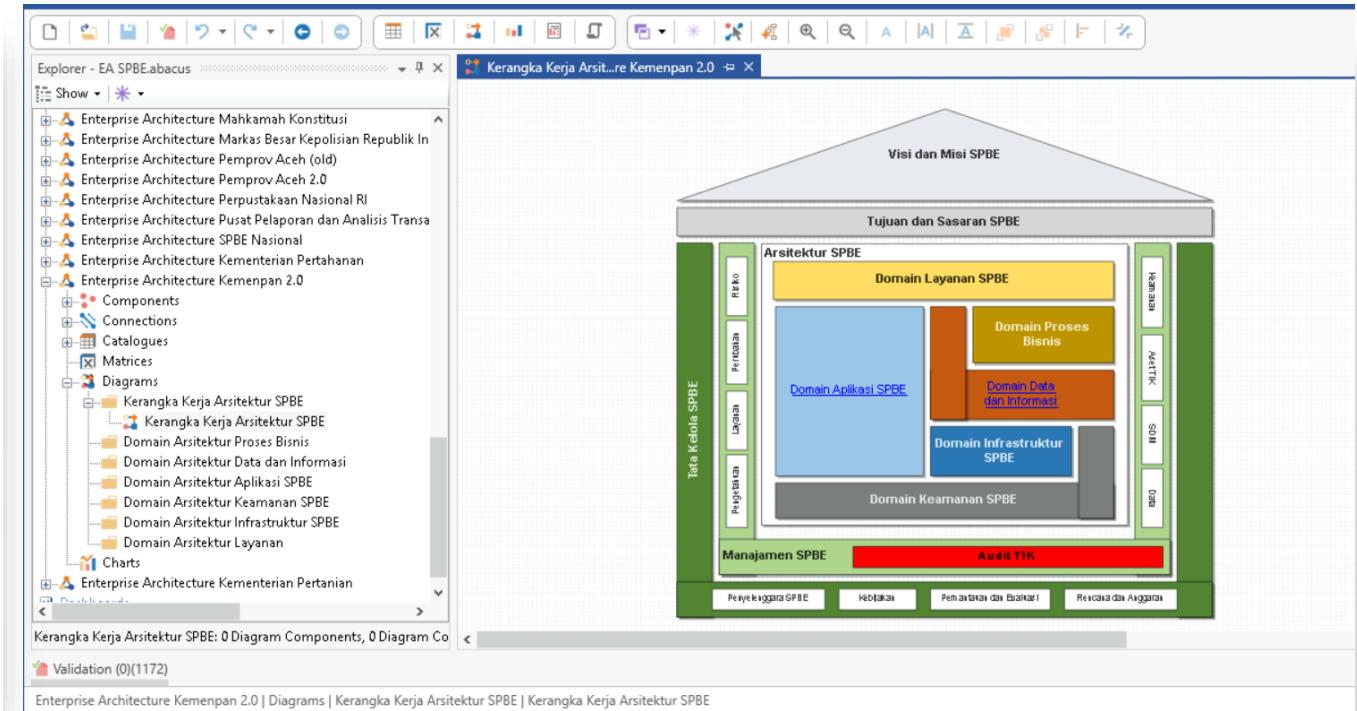
Selamat Datang di Arsitektur SPBE



Username * (required)

Password * (required)

Login



Permodelan Kerangka Kerja Arsitektur SPBE
pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE

Domain Arsitektur

Referensi

Domain Arsitektur Proses Bisnis

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditegakkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	→ Untuk
DAB.09.06.07.03.01	Persiapan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan persiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijak Penera
DAB.09.06.07.03.02	Pemantauan Penerapan SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan pelaksanaan pemantauan SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan indeks SPBE nasional	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijak Penera
DAB.09.06.07.03.04	Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Nasional	Proses bisnis ini terkait dengan pelaksanaan pelaporan pemantauan SPBE di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah	SS1. Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	IKU 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, IKU 3. Jumlah K/L/D yang Mencapai Predikat SPBE "Baik"	IKU 2 = 2,6, IKU 3=450	IKU 2 = 2,24, IKU 3=300	Asisten Kebijak Penera

Metadata

PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE PADA TEMPLATE EXCEL



Domain Arsitektur Proses Bisnis_R1 - Excel (Product Activation Failed)

aimarrizki@gmail.com

	B	C	D	G	H	I	J	K	L	
2	ID Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis	RAB Level 3 → RAB Level 4 → RAB Level 5 → RAB Level 6 → Unit Kerja (Dependency)						Uraian Unit Kerja
3	Aceh-01	Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan	Tugas umum pemerintahan di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pembinaan pelayanan kesehatan, pengembangan sumber daya kesehatan dan kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	RAB.04.01.01 Perlindungan dan Pelayanan Kesehatan					Dinas Kesehatan	
4	Aceh-01.01	Kesehatan Masyarakat			RAB.04.01.01.01 Kesehatan Masyarakat					
5	Aceh-01.01.01	Kesehatan Keluarga dan Gizi				RAB.04.01.01.01.01 Kesehatan Keluarga dan Gizi				
6	Aceh-01.01.02	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				RAB.04.01.01.01.02 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat				
7	Aceh-01.01.03	Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				RAB.04.01.01.01.03 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga				
8	Aceh-01.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			RAB.04.01.01.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
9	Aceh-01.02.01	Surveilans dan Imunisasi				RAB.04.01.01.02.01 Surveilans dan Imunisasi				
10	Aceh-01.02.02	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				RAB.04.01.01.02.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular				
11	Aceh-01.02.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa				RAB.04.01.01.02.03 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa				
12	Aceh-01.03	Pembinaan Pelayanan Kesehatan			RAB.04.01.01.03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
13	Aceh-01.03.01	Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional				RAB.04.01.01.03.01 Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional				
	Aceh-01.03.02	Pelayanan Kesehatan				RAB.04.01.01.03.02 Pelayanan				

Domain Arsitektur



Sinergi untuk Indonesia Maju

DOMAIN PROSES BISNIS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



DASAR HUKUM PROSES BISNIS:

PERATURAN MENTERI PANRB

NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG

PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

INSTANSI PEMERINTAH

DEFINISI PROSES & DEFINISI PROSES BISNIS

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah *input* menjadi *output*

[Pasal 1 angka 4, Permen PANRB 19/2018]

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur

dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing

[Pasal 1 angka 14, Perpres 95/2018]



DEFINISI PETA PROSES BISNIS

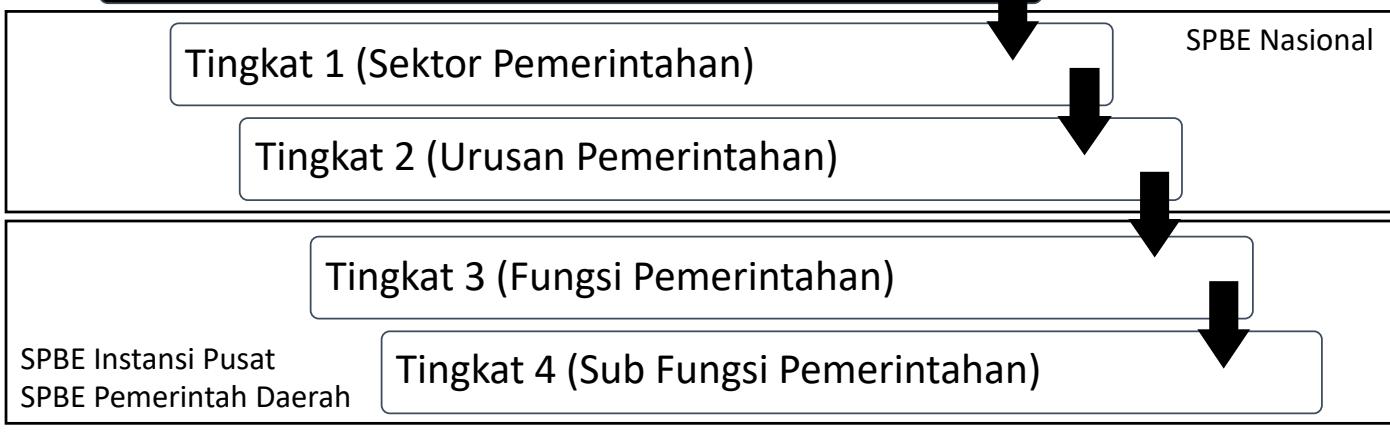


Peta Proses Bisnis adalah **diagram** yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien **antar unit organisasi** untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan **tujuan pendirian organisasi** agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

[Pasal 1 angka 1, Permen PANRB 19/2018]

REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Referensi Arsitektur Proses Bisnis



STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri	↔	RAB.01.01 - Pertahanan RAB.01.02 - Urusan luar negeri
RAB.02 - Ekonomi dan Industri	↔	RAB.02.01 - Industri RAB.02.02 - Perdagangan RAB.02.03 - Pertanian RAB.02.04 - Perkebunan RAB.02.05 - Peternakan RAB.02.06 - Perikanan RAB.02.07 - Badan usaha milik negara RAB.02.08 - Investasi RAB.02.09 - Koperasi RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah RAB.02.11 - Pariwisata
RAB.03 - Pembangunan Kewilayahana	↔	RAB.03.01 - Pekerjaan umum RAB.03.02 - Transmigrasi RAB.03.03 - Transportasi RAB.03.04 - Perumahan RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau daerah tertinggal RAB.03.06 - Pertanahan RAB.03.07 - Kependudukan
RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan	↔	RAB.04.01 - Kesehatan RAB.04.02 - Sosial RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan
RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan	↔	RAB.05.01 - Hukum RAB.05.02 - Keamanan RAB.05.03 - Hak asasi manusia
RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja	↔	RAB.06.01 - Pendidikan RAB.06.02 - Ketenagakerjaan RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan RAB.06.04 - Teknologi RAB.06.05 - Pemuda RAB.06.06 - Olahraga
RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam	↔	RAB.07.01 - Pertambangan RAB.07.02 - Energi RAB.07.03 - Kehutanan RAB.07.04 - Kelautan RAB.07.05 - Lingkungan hidup
RAB.08 - Budaya dan Agama	↔	RAB.08.01 - Agama RAB.08.02 - Kebudayaan
RAB.09 - Pemerintahan Umum	↔	RAB.09.01 - Dalam negeri RAB.09.02 - Keuangan RAB.09.03 - Informasi RAB.09.04 - Komunikasi RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional RAB.09.06 - Aparatur negara RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

MENENTUKAN REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



Referensi Arsitektur Proses Bisnis tidak selalu bergantung pada struktur instansi pemerintah.

Dengan kata lain, suatu instansi pemerintah mungkin saja mengacu kepada lebih dari 1 (satu) Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

Contoh: Proses Bisnis di Kementerian PANRB tidak selalu mengacu pada RAB.09.06 Aparatur Negara,

Proses Bisnis yang berkaitan dengan hukum, misalnya, tetap mengacu pada RAB.05.01 Hukum.

CONTOH TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR SPBE MENGGUNAKAN ANALOGI BIOLOGI

ID	NAMA (SPESIES)	LEVEL 1 (KINGDOM)	LEVEL 2 (KELAS)	LEVEL 3 (ORDO)	LEVEL 4 (SPESIES)
BIOLOGI-DAB.01.01.01.01	Kucing (<i>Felis Catus</i>)	RAB.01 Animalia	RAB.01.01 Mammalia	RAB.01.01.01 Carnivora	RAB.01.01.01.01 <i>Felis Catus</i>
BIOLOGI-DAB.01.01.02.01	Kuda (<i>Equus Ferus</i>)	RAB.01 Animalia	RAB.01.01 Mammalia	RAB.01.01.02 Perissodactyla	RAB.01.01.02.01 <i>Equus Ferus</i>
BIOLOGI-DAB.02.01.01.01	Jagung (<i>Zea Mays</i>)	RAB.02 Plantae	RAB.02.01 Liliopsida	RAB.02.01.01 Cyperales	RAB.02.01.01.01 <i>Zea Mays</i>



CONTOH TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR SPBE MENGGUNAKAN ANALOGI KETURUNAN

ID	NAMA	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4
KETURUNAN-DAB.01.01.01.01	Sutrisno	RAB.01 Buyutnya Sutrisno	RAB.01.01 Kakeknya Sutrisno	RAB.01.01.01 Bapaknya Sutrisno	RAB.01.01.01.01 Sutrisno
KETURUNAN-DAB.02.01.01.01	Nurhayati	RAB.02 Buyutnya Nurhayati	RAB.02.01 Neneknya Nurhayati	RAB.02.01.01 Ibunya Nurhayati	RAB.02.01.01.01 Nurhayati
<p>Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)</p> <p>Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)</p>	<p>Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)</p>	<p>Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)</p>	<p>Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditempuh)</p>	<p>Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)</p> <p>→ Unit Kerja (Dependency)</p>	<p>→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)</p> <p>→ RAB Level 2 (Dependency)</p> <p>→ RAB Level 3 (Dependency)</p> <p>→ RAB Level 4 (Dependency)</p> <p>→ Instansi (Dependency)</p>

CONTOH KASUS TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR PROSES BISNIS



Suatu buku berjudul **Hukum Ekonomi** harus diletakkan pada suatu rak buku.

Di manakah buku tersebut harus diletakkan?

Pada rak yang berisi buku-buku terkait **hukum** atau terkait **ekonomi**?

Siapa yang berhak menentukannya?

REMINDER: Suatu komponen muatan Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis tidak boleh menginduk pada lebih dari 1 (satu) pengelompokan.

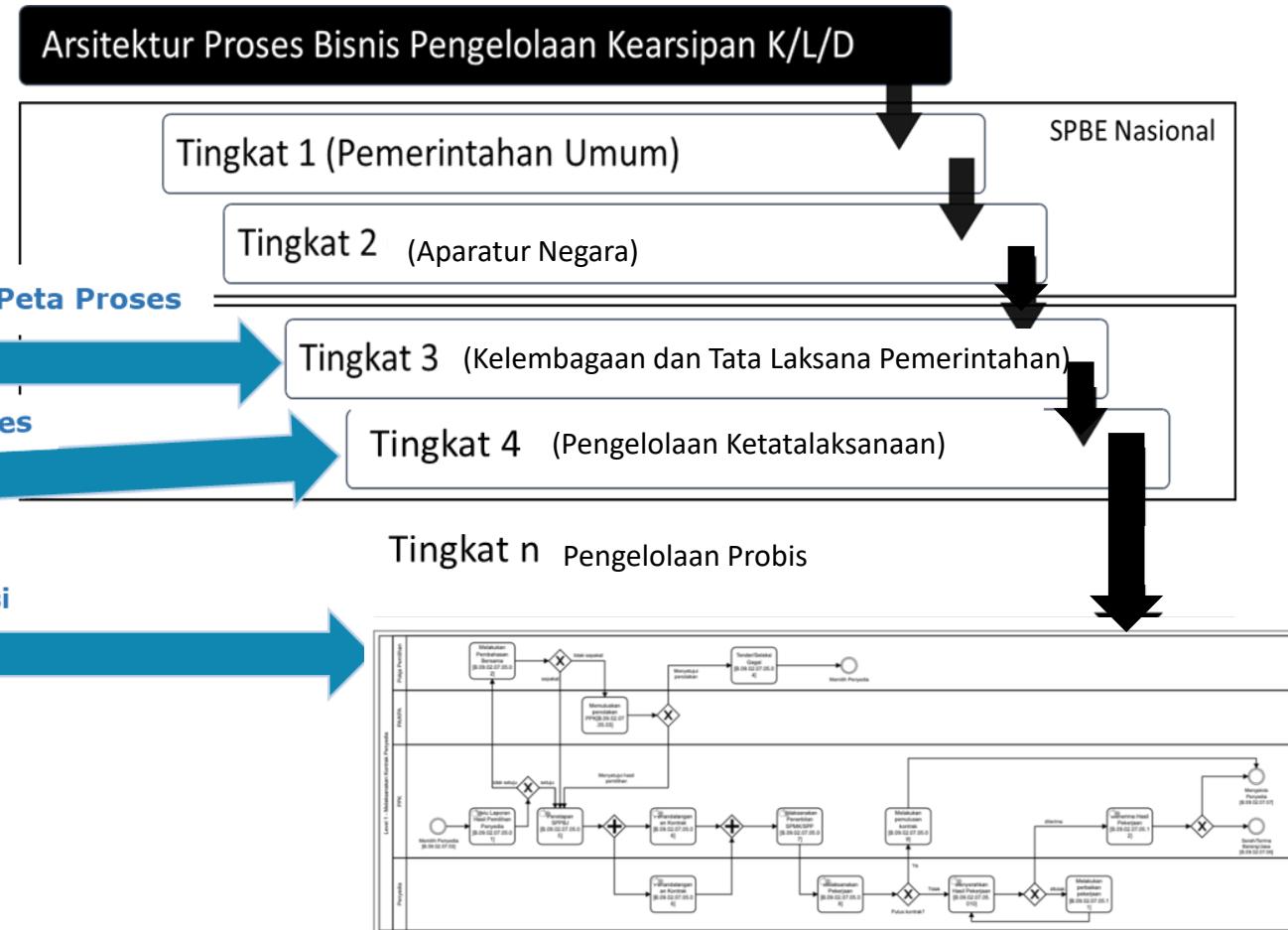
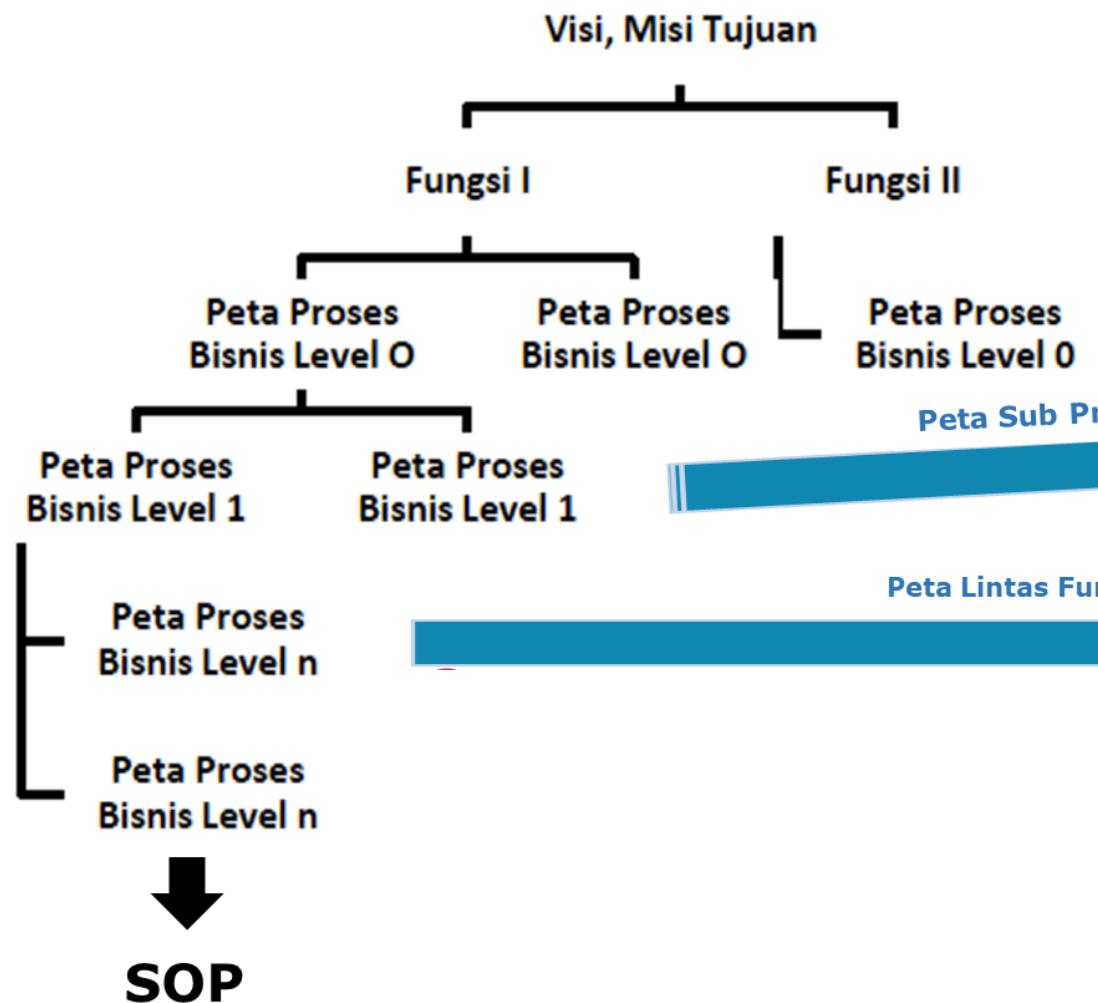
PENYELESAIAN CONTOH KASUS



Dalam hal kita ragu menentukan di mana seharusnya buku tersebut diletakkan (dengan kata lain: pada pengelompokan mana suatu komponen Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis menginduk), kita dapat melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

- **Mencari unsur yang lebih dominan** (dalam contoh, unsur hukum lebih dominan, sehingga buku Hukum Ekonomi lebih tepat diletakkan pada rak yang berisi buku-buku terkait hukum).
- **Membaginya menjadi 2 (dua) komponen Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis** agar dapat masuk ke masing-masing induk pengelompokan.

CONTOH ARSITEKTUR PROSES BISNIS





ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR PROSES BISNIS



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata. Contoh: PANRB-DAB.01.01.01
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan deskripsi/uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Sasaran Strategis	Merupakan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.
5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis. Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.
6	Nilai IKU Target	Nilai yang IKU yang ditargetkan (pada tahun terakhir dari dokumen sumber IKU).
7	Nilai IKU Realisasi	Nilai yang IKU yang telah dicapai (pada tahun di mana dokumen Arsitektur SPBE disusun).
8	Unit Kerja	Merupakan unit kerja yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.
9	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih.
10	Instansi	Merupakan instansi yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.



Sinergi untuk Indonesia Maju

DOMAIN LAYANAN SPBE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



LAYANAN SPBE & PENGGUNA SPBE



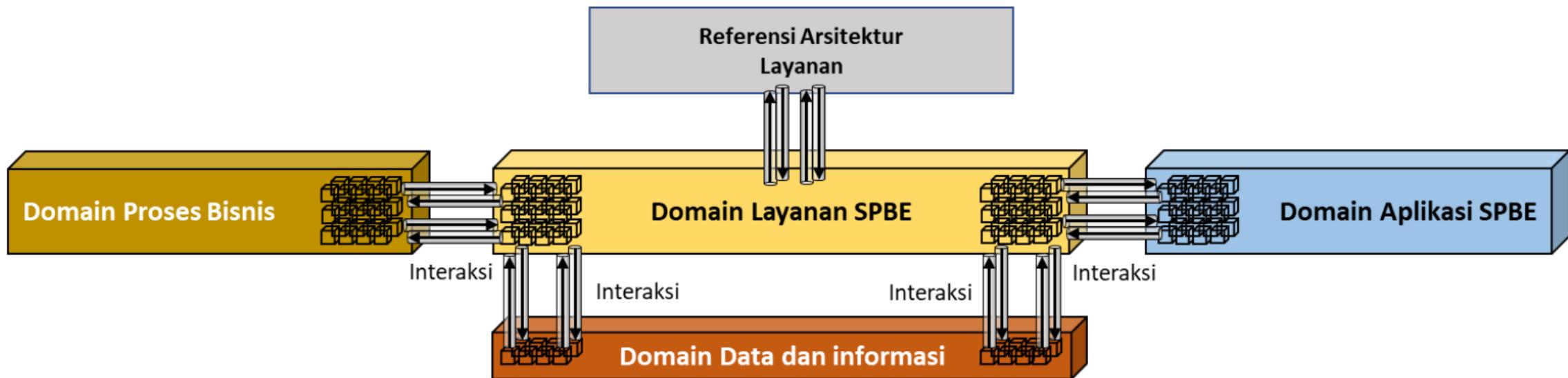
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
[Pasal 1 angka 4, Perpres 95/2018]

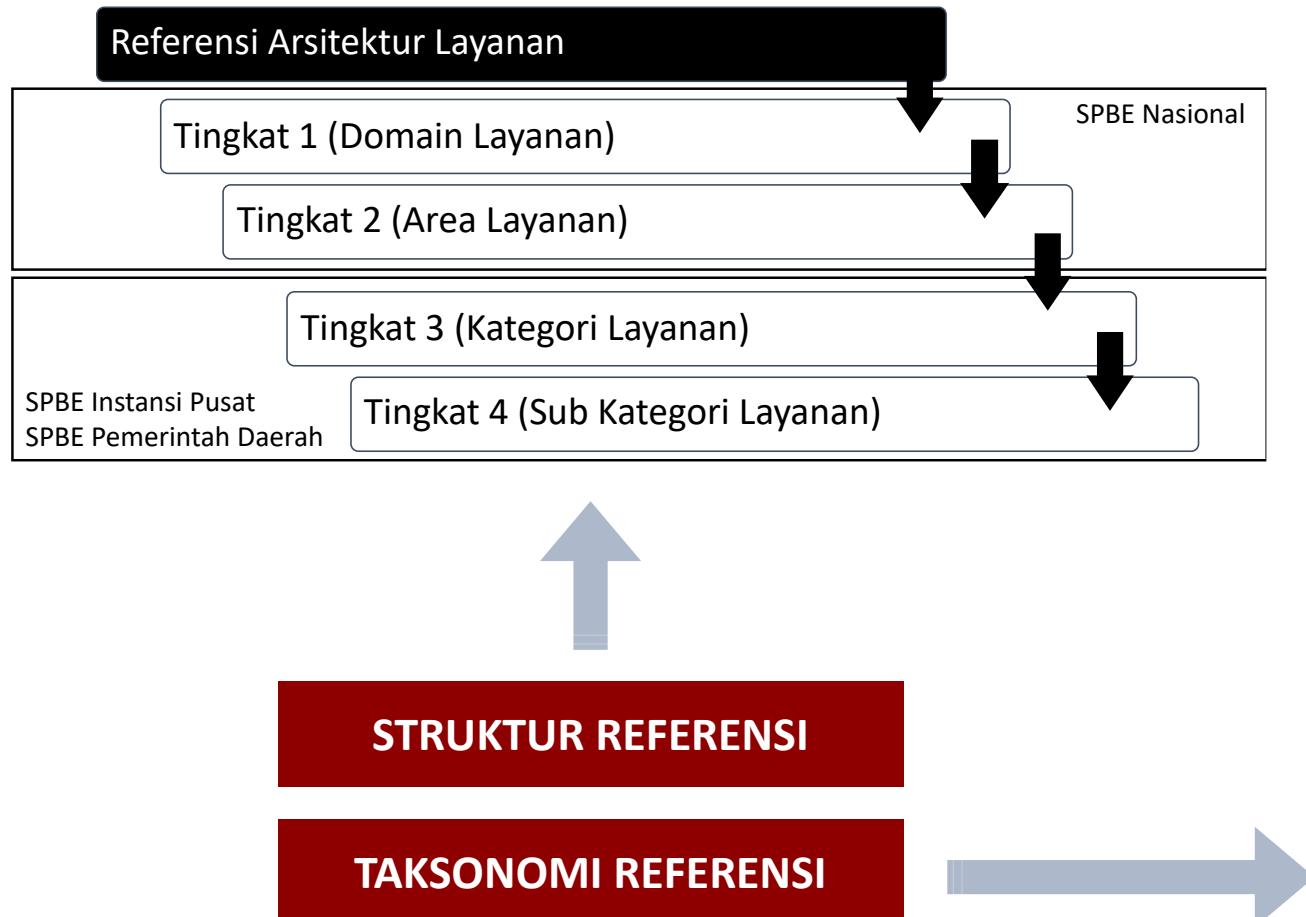
Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
[Pasal 1 angka 26, Perpres 95/2018]

RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN LAYANAN SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju

REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



Tingkat 1 (Domain Layanan)	Tingkat 2 (Area Layanan)
RAL.01 Layanan Publik	<p>RAL.01.01 Pertahanan RAL.01.02 Urusan Luar Negara RAL.01.03 Kemerdekaan RAL.01.04 Ekonomi RAL.01.05 Industri RAL.01.06 Perdagangan RAL.01.07 Pertanian RAL.01.08 Perkebunan RAL.01.09 Peternakan RAL.01.10 Perikanan RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara RAL.01.12 Investasi RAL.01.13 Koperasi RAL.01.14 Usaha Kecil Dan Menengah RAL.01.15 Pariwisata RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi RAL.01.17 Pekerjaan Umum RAL.01.18 Transmigrasi RAL.01.19 Transportasi RAL.01.20 Perumahan RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal RAL.01.22 Pertanian RAL.01.23 Kependudukan RAL.01.24 Pemerintahan daerah RAL.01.25 Kesehatan RAL.01.26 Sosial RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan RAL.01.28 Hukum RAL.01.29 Keamanan RAL.01.30 Hak Asasi Manusia RAL.01.31 Pendidikan RAL.01.32 Ketenaqakerjaan RAL.01.33 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi RAL.01.34 Pemuda RAL.01.35 Olahraga RAL.01.36 Pertambangan RAL.01.37 Energi RAL.01.38 Kehutanan RAL.01.39 Kelautan RAL.01.40 Lingkungan Hidup RAL.01.41 Aqama RAL.01.42 Kebudayaan RAL.01.43 Informasi RAL.01.44 Komunikasi</p>
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintah	<p>RAL.02.01 Dalam Negara RAL.02.02 Keuangan RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional RAL.02.04 Aparatur Negara RAL.02.05 Kesekretariatan Negara RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan</p>



ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

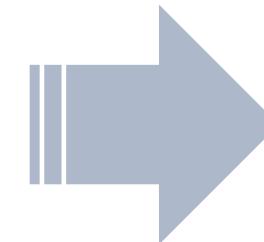


No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Layanan	nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	penjelasan tujuan dari layanan.
4	Fungsi Layanan	uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan.
5	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan.
6	Kementerian/Lembaga terkait (Dependency)	kementerian/lembaga terkait dengan layanan.
7	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan.
8	Target Layanan (Dependency)	target pengguna layanan.
9	Metode Layanan	model dari layanan (Elektronik atau Non Elektronik).
10	Potensi Manfaat	manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
11	Potensi Ekonomi	kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE.
12	Potensi Risiko	potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE.
13	Mitigasi Risiko	mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE.
14	Proses Bisnis (Dependency)	proses bisnis yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.
15	Kode Model Referensi	kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusian yang dipilih.
16	Instansi	instansi yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.

ATRIBUT METADATA LAYANAN POTENSI EKONOMI-POTENSI RISIKO



11	Potensi manfaat	Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
12	Potensi ekonomi	Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
13	Potensi risiko	Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE



Analisis Biaya-Manfaat (CBA)

Digunakan untuk melakukan justifikasi dalam pengembangan layanan elektronik ke depan

No	Atribut Metadata	Komponen Perhitungan	Satuan Konversi
12	Potensi Ekonomi	<p>Direct benefit, indirect benefit, intangible benefit, competitive benefit</p> <p>Contoh: <u>Penyediaan layanan digital aparatur negara</u> (Kuantifikasi potensi manfaat dari 4 juta ASN yang sebelumnya melakukan pelatihan fisik dengan biaya 1 juta/orang, maka terdapat potensi penghematan sebesar 4 trilyun bila dilakukan secara online)</p>	Rupiah
13	Potensi Risiko	<p>Direct cost, indirect cost, intangible cost, opportunity cost</p> <p>Contoh: <u>Proses migrasi layanan transaksi elektronik keuangan dalam transaksi penerimaan negara, dengan jumlah transaksi 24 miliar/hari</u> (potensi risiko, bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan migrasi, maka potensi risiko kehilangan potensi penerimaan negara sebesar 1 miliar/jam)</p>	Rupiah



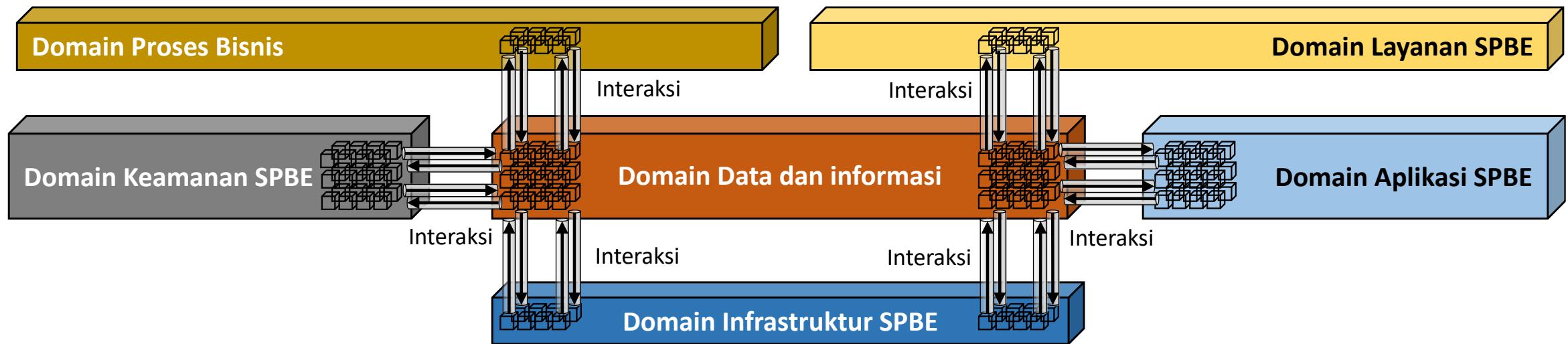
Sinergi untuk Indonesia Maju

DOMAIN DATA & INFORMASI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

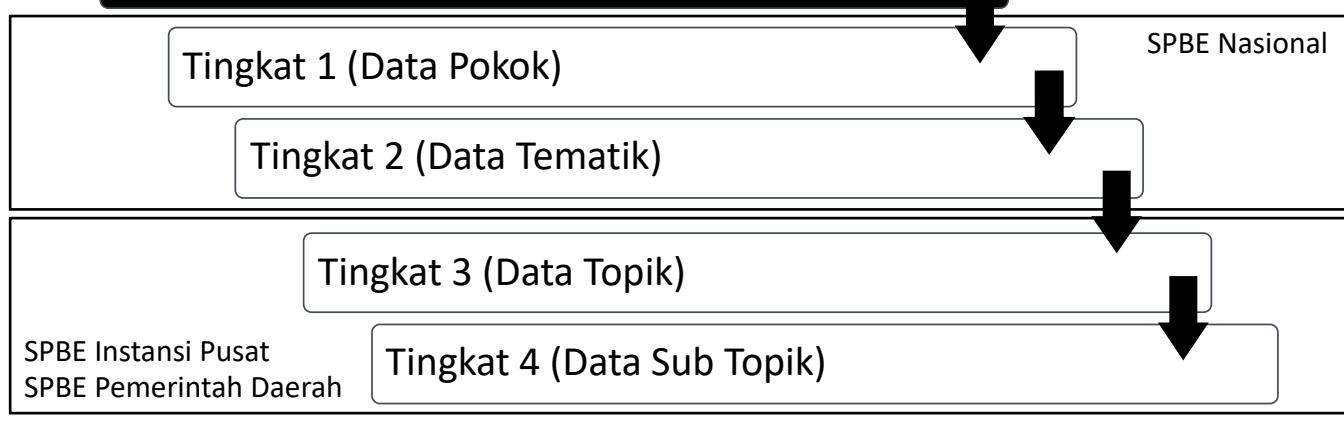
RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN DATA & INFORMASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

REFERENSI ARSITEKTUR DATA & INFORMASI

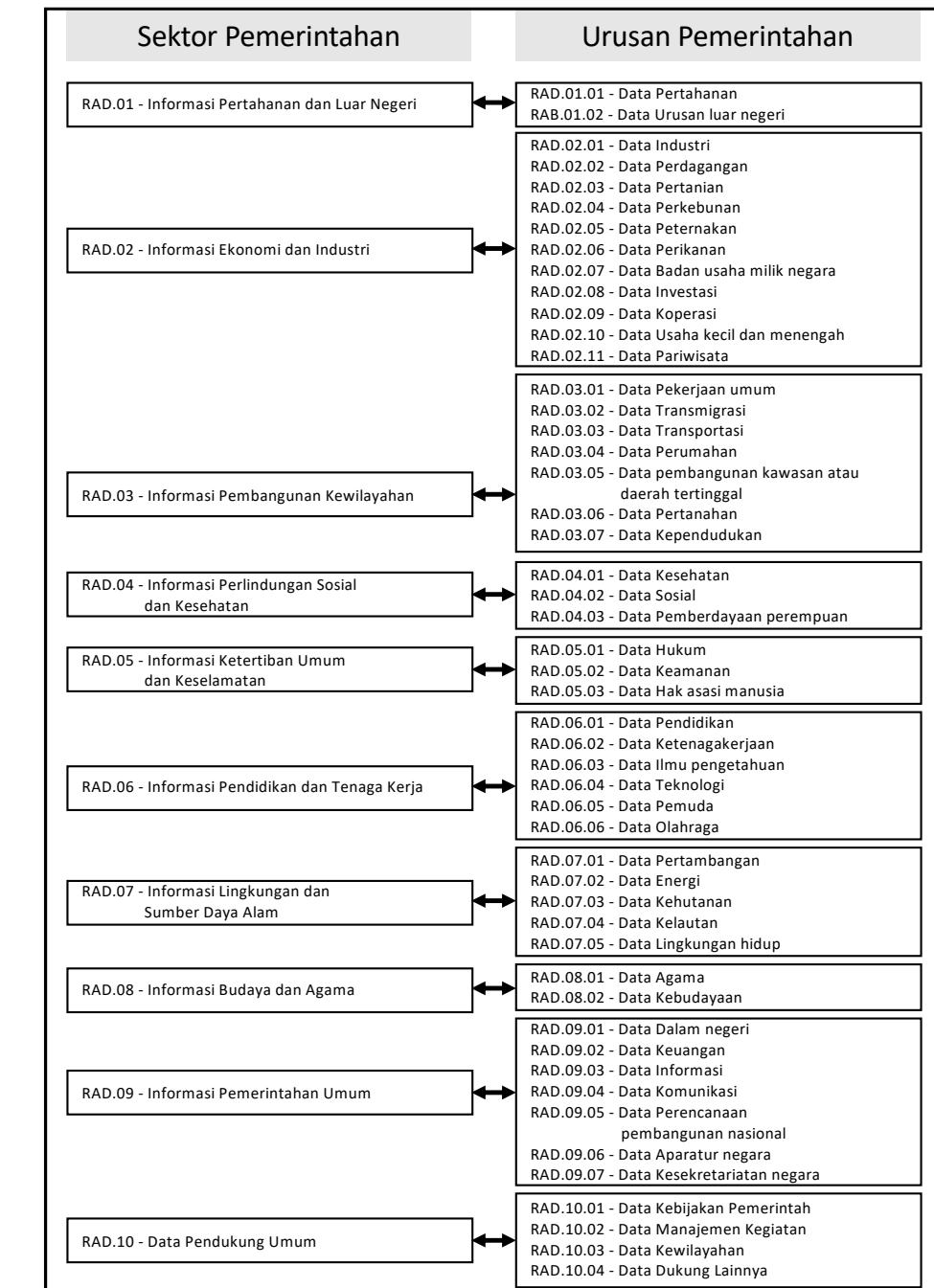
Referensi Arsitektur Data dan Informasi



STRUKTUR REFERENSI



TAKSONOMI REFERENSI





ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR DATA & INFORMASI



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No.	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data [opsi: Terbatas (sebagian boleh mengakses), Terbuka (untuk publik siapapun boleh), dan Tertutup (bersifat rahasia)]
6	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya (opsi: Data Statistik, Data Geospasial, Data Keuangan, dan Data Lainnya)
7	Validitas Data	Merupakan waktu berlakunya data (misal: mingguan, bulanan, tahunan, dll).
8	Penghasil Data/Produsen Data	Merupakan unit/OPD penghasil data
9	Penanggung Jawab Data/Wali Data	Merupakan penanggung jawab data
10	Informasi yang terkait (<i>output</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dihasilkan
11	Informasi yang terkait (<i>input</i>)	Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang dibutuhkan
12	Interoperabilitas	Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data dengan data yang lain (Ya/Tidak)



ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR DATA & INFORMASI



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No.	Nama Atribut	Keterangan
13	Proses Bisnis (Dependency)	Merupakan proses bisnis yang berkaitan dengan data terkait.
14	Layanan (Dependency)	Merupakan layanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
15	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi yang terdiri dari RAD Level 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
16	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
17	Audit Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Audit Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
18	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
19	Kelaikan Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Kelaikan Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
20	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
21	Penanganan Insiden Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Penanganan Insiden Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
22	Peningkatan Keamanan SPBE (Dependency)	Merupakan Peningkatan Keamanan SPBE yang berkaitan dengan data terkait.
23	Instansi (Dependency)	Merupakan instansi yang berkaitan dengan data terkait.



DATA & INFORMASI YANG BERKUALITAS MENDUKUNG SPBE YANG BERKUALITAS, DAN VICE VERSA

Penggunaan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akan menghasilkan luaran yang baik berbentuk informasi ataupun kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan akurat.

Data dan informasi yang **diproduksi** dan **dikelola** oleh suatu **instansi** merupakan kumpulan hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan **layanan** instansi tersebut sebagai pengampu **proses bisnis** tertentu.

Sinergi untuk Indonesia Maju



Sinergi untuk Indonesia Maju

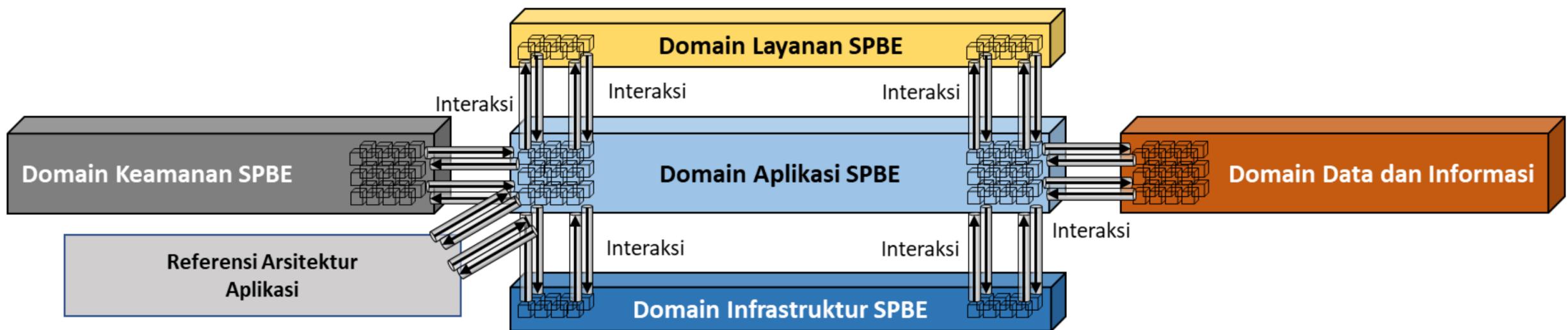
DOMAIN APLIKASI SPBE

BerAKHLAK[®]

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN APLIKASI SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju



APLIKASI SPBE



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. [Pasal 1 angka 21, Perpres 95/2018]

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. [Pasal 1 angka 22, Perpres 95/2018]

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. [Pasal 1 angka 23, Perpres 95/2018]



APLIKASI UMUM (yang telah ditetapkan)



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

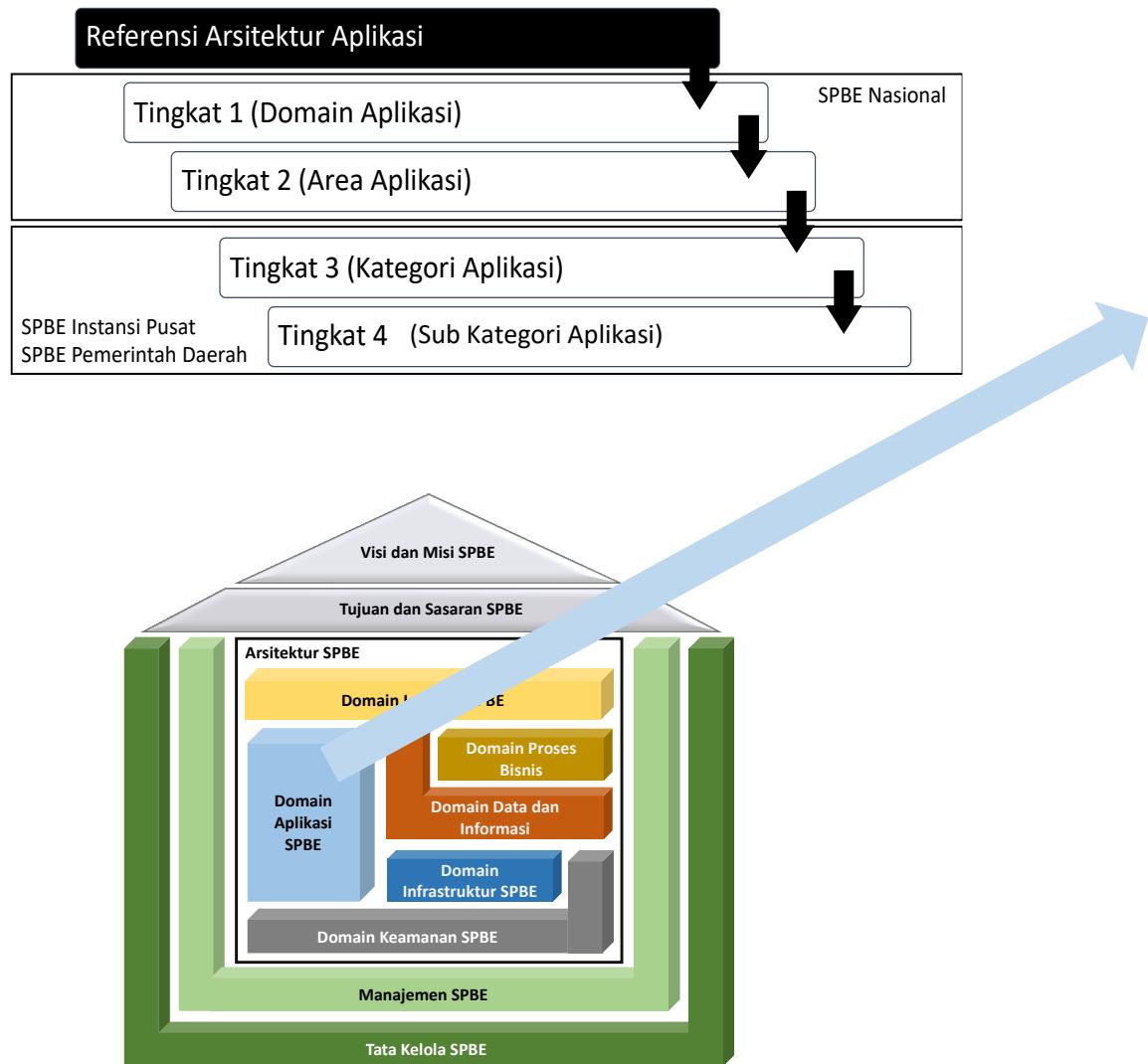


- Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang **Kearsipan Dinamis**
 - Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (**SRIKANDI**)
- Keputusan Menteri PANRB No. 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang **Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik**
 - Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (**SP4N-LAPOR!**)
- Keputusan Menteri PANRB No. 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang **Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**
 - Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (**SPSE**)

REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE



Struktur Referensi



Taksonomi Referensi

Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Aplikasi Umum

Aplikasi Umum Layanan Publik

Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

Aplikasi Khusus

Aplikasi Khusus
Misi Tertentu

Aplikasi Khusus
Fungsi Tertentu

Apakah inovasi yang diusulkan berkaitan dengan pengembangan aplikasi?

(Jika Ya)

1. Nama Aplikasi (tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)
2. Uraian Aplikasi (uraikan definisi dan penjelasan dari aplikasi)
3. Fungsi Aplikasi (jabarkan fitur utama dalam aplikasi)



4. Layanan (apa saja layanan yang difasilitasi dalam aplikasi)



5. Data
 - apa saja data yang diperlukan sebagai input dalam aplikasi
 - apa saja data yang dihasilkan oleh aplikasi
 - apakah terdapat interoperabilitas data yang dilakukan dengan aplikasi lain?



6. Proses Bisnis (uraikan alur proses utama pada aplikasi dalam memberikan layanan)



Untuk memastikan *inovasi pelayanan publik* terkait aplikasi selaras dengan **prinsip SPBE maka perlu dikumpulkan **metadata Arsitektur SPBE****

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

1. Data dan informasi yang diinput akan dianalisis untuk melihat gambaran penerapan SPBE pada usulan KIPP yang terkait aplikasi
2. Hasil analisis akan dijadikan dasar dalam penilaian KIPP ke depan (terutama untuk usulan yang terkait aplikasi) untuk menentukan indikator penilaian dan kriterianya terkait keselarasannya dengan prinsip SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju

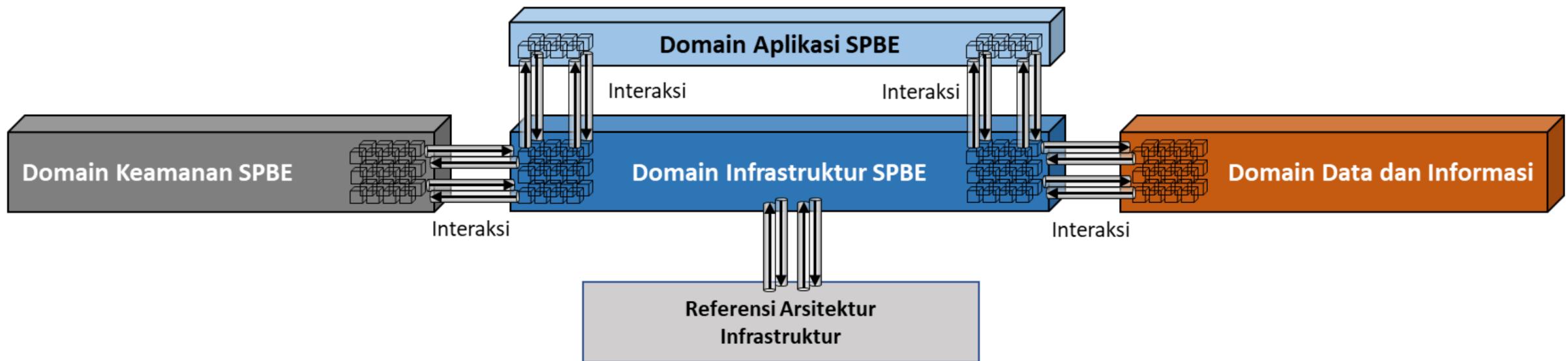
DOMAIN INFRASTRUKTUR SPBE

BerAKHLAK[®]

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN INFRASTRUKTUR SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju



INFRASTRUKTUR SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.



Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang **terhubung** dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan **digunakan secara bagi pakai** oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. terdiri atas:

- a. Pusat Data Nasional;
- b. Jaringan Intra pemerintah; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah **masing-masing**. terdiri atas:

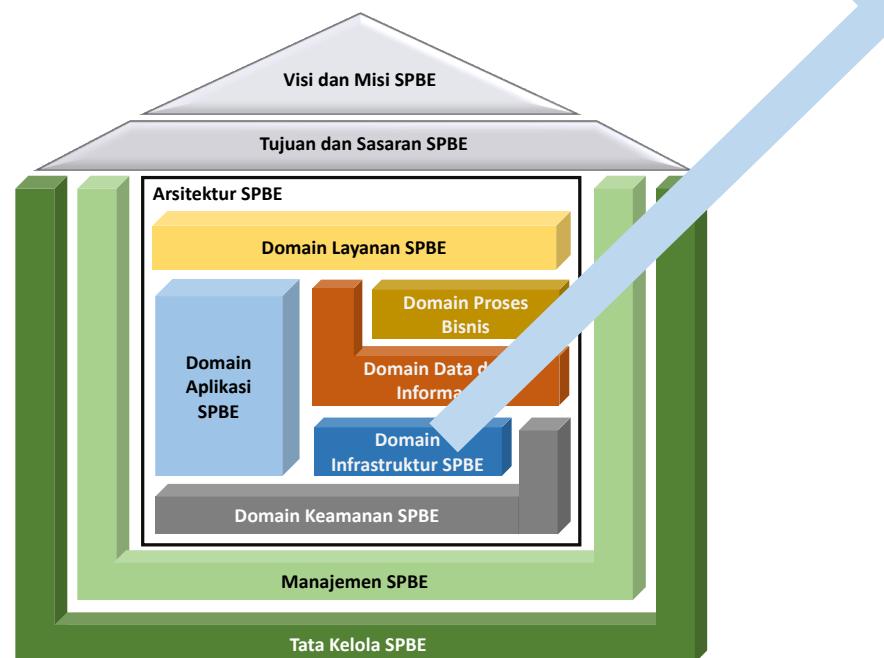
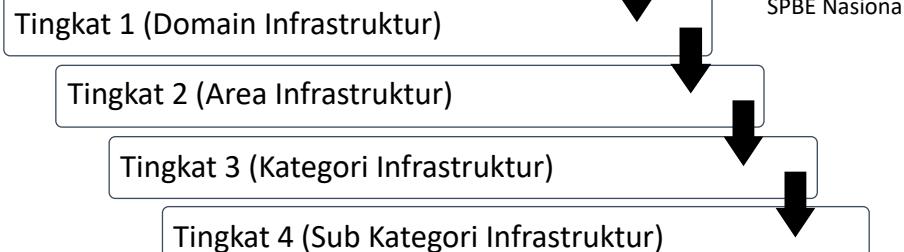
- a. Jaringan Intra IPPD; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan IPPD.

REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE



Struktur Referensi

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE



Taksonomi Referensi

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Platform

Komputasi Awan

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Sistem Integrasi

Sistem Penghubung Layanan (SPL) Pemerintah

SPL Instansi Pusat

SPL Pemerintah Daerah

Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Instansi Pusat

Jaringan Intra Pemerintah
Daerah

Fasilitas Komputasi

Pusat Data Nasional

Pusat Komputasi

Pusat Kendali



METADATA ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

- KOMPUTASI AWAN
- PERANGKAT LUNAK PLATFORM
- PERANGKAT KERAS SERVER
- PERANGKAT KERAS MEDIA PENYIMPANAN
- PERANGKAT KERAS JARINGAN
- PERANGKAT KERAS KEAMANAN
- PERANGKAT KERAS PERIFERAL
- SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH
- JARINGAN INTRA PEMERINTAH
- FASILITAS KOMPUTASI



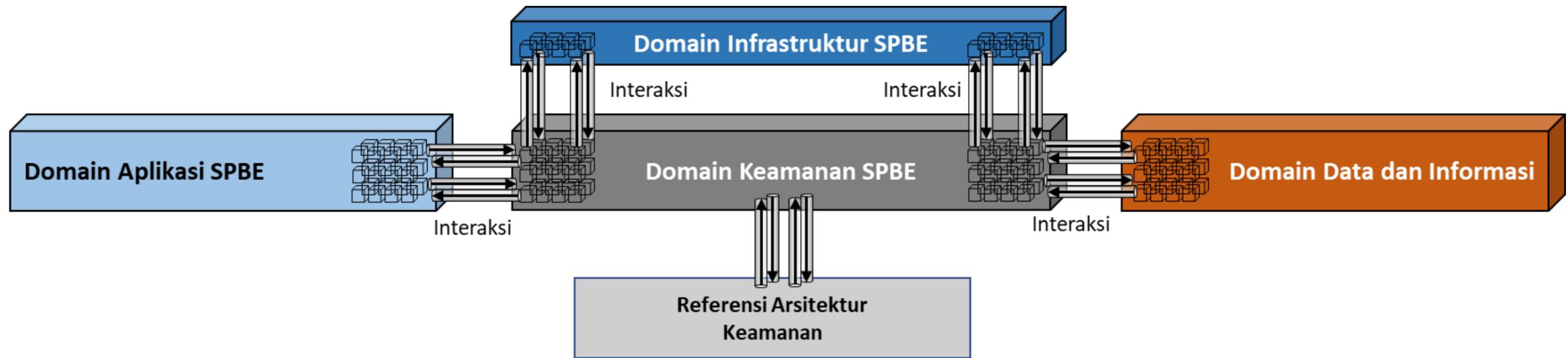
Sinergi untuk Indonesia Maju

DOMAIN KEAMANAN SPBE

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

RELASI LANGSUNG PADA DOMAIN KEAMANAN SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju



KEAMANAN SPBE



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

[Pasal 1 angka 24, Perpres 95/2018]

Keamanan sebagai salah satu prinsip SPBE

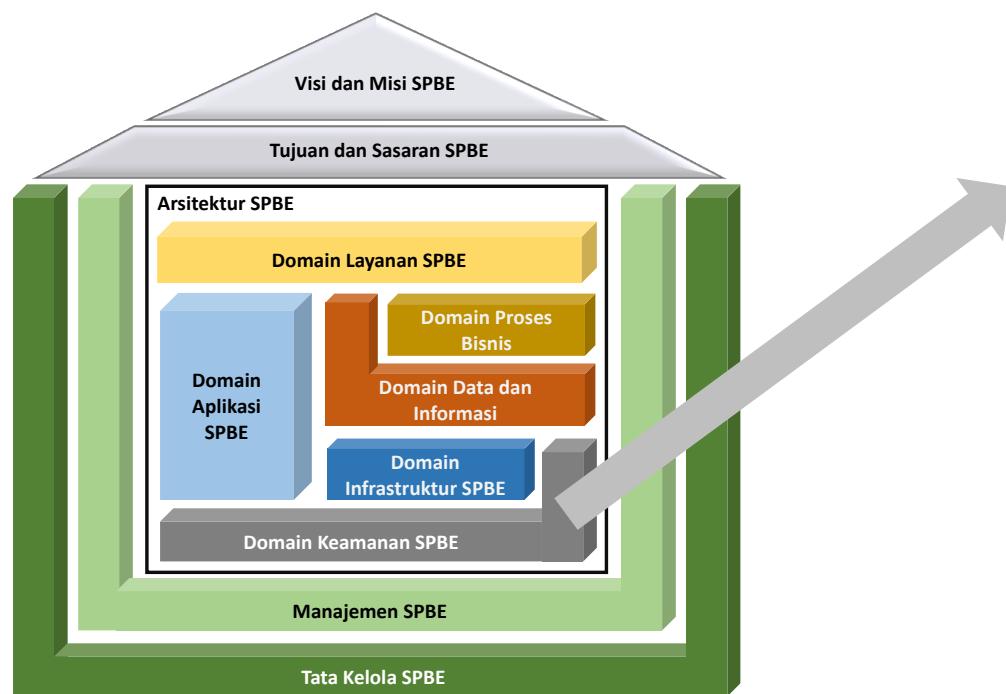
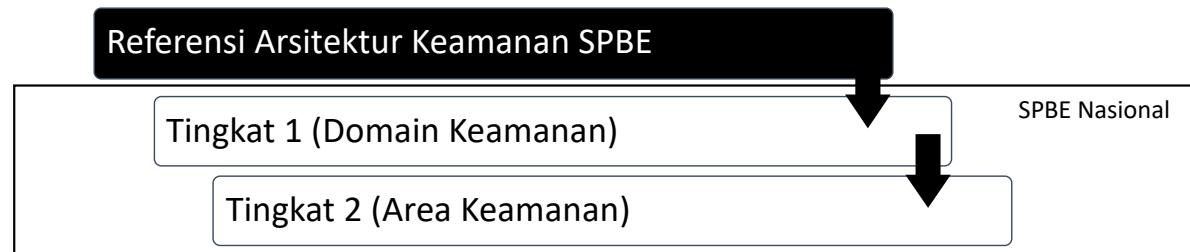
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

[Pasal 2 ayat (8), Perpres 95/2018]



REFERENSI ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

Struktur Referensi

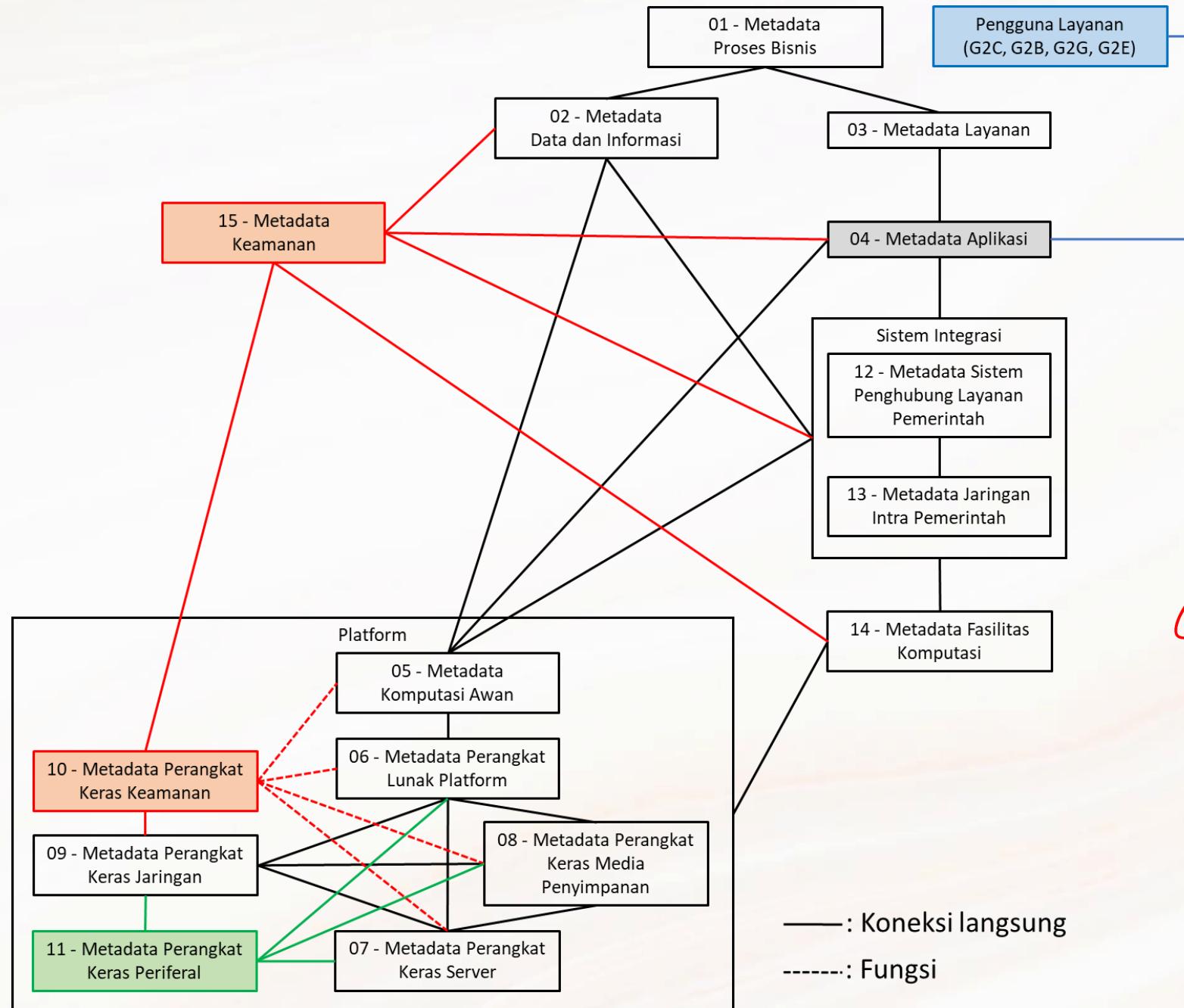


Taksonomi Referensi



METADATA ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

- STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE
- PENERAPAN KEAMANAN SPBE:
 - AUDIT KEAMANAN SPBE
 - EDUKASI KESADARAN KEAMANAN SPBE
 - IDENTIFIKASI KERENTANAN KEAMANAN SPBE
 - PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN SPBE
 - PENINGKATAN KEAMANAN SPBE
- KELAIKAN KEAMANAN SPBE



RELASI METADATA ARSITEKTUR SPBE

Sinergi untuk Indonesia Maju



PETA RENCANA SPBE



panrb
KEMENTERIAN
PENYADARAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dari dokumen Strategis Instansi Pusat (Renstra) / Pemerintah Daerah (RPJMD)

Inisiatif Strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sesuai dengan tematik layanan digital

Sinergi untuk Indonesia Maju

No	Project/Activities	UIC	Baseline		Target	
			2022	2023	2024	(Target)
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Program/Kegiatan)						
Indikator	(Indikator)					(Target)
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
B (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
2 Manajemen						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
3 Layanan						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
4 Aplikasi						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
5 Infrastruktur						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
6 Keamanan						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
7 Audit TIK						
A (Program)		(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
- (Kegiatan)						
- (Kegiatan)						
...						
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisiatif Strategis)						
1 Tata Kelola						
...						
7 Audit TIK						
...						

Muan Peta Rencana SPBE

Terdapat 7 (Tujuh) Muatan Peta Rencana SPBE sesuai amanat Perpres No 95 Tahun 2018

Program

Program dengan UIC dan Target yang direncanakan pada Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah

Kegiatan

Kegiatan rinci untuk mendukung pencapaian setiap Program pada Peta Rencana SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENYADARAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



SEKTOR PEMERINTAHAN PRIORITAS:

Ekonomi & Industri, Pembangunan Kewilayah, Kesehatan, Sosial, Hukum & Keamanan, Pendidikan, & Pemerintahan Umum

EKONOMI & INDUSTRI



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Layanan Perizinan Berusaha
dan Akreditasi Terintegrasi

Penyelenggaraan layanan perizinan berusaha dan akreditasi terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perizinan berusaha dan akreditasi yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



**Layanan Monitoring
Pembangunan Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat**

Penyelenggaraan layanan pekerjaan umum, antara lain berupa pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terintegrasi

KESEHATAN



**Layanan Kesehatan
Terintegrasi**

Penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang kesehatan yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENYADARAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



SEKTOR PEMERINTAHAN PRIORITAS:

Ekonomi & Industri, Pembangunan Kewilayahan, Kesehatan, Sosial, Hukum & Keamanan, Pendidikan, & Pemerintahan Umum

HUKUM & KEAMANAN



Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi

Penyelenggaraan layanan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi melalui integrasi aplikasi administrasi penanganan perkara di lembaga penegak hukum



Layanan Penerbitan SIM Online

Penyelenggaraan layanan perlindungan masyarakat antara lain berupa SIM online, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perlindungan masyarakat yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

SOSIAL



Layanan Bantuan Sosial Terintegrasi

Penyelenggaraan layanan bantuan sosial terpadu berbasis elektronik, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang sosial yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan

PENDIDIKAN



Layanan Pendidikan Terintegrasi

Penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis elektronik melalui Aplikasi Umum SPBE bidang pendidikan yang terintegrasi pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENYADARAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



SEKTOR PEMERINTAHAN PRIORITAS:

Ekonomi & Industri, Pembangunan Kewilayahan, Kesehatan, Sosial, Hukum & Keamanan, Pendidikan, & **Pemerintahan Umum**

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional



Layanan Administrasi Pemerintahan di Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang perencanaan pembangunan dan anggaran Pemerintah Daerah yang terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan



Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Aparatur Negara

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan aparatur negara, melalui Aplikasi Umum SPBE bidang aparatur negara



Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan Negara

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan kesekretariatan negara, termasuk didalamnya berupa pengelolaan *executive information system*, terintegrasi pada portal pelayanan administrasi pemerintahan



Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional berbasis elektronik



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



SEKTOR PEMERINTAHAN PRIORITAS:

Ekonomi & Industri, Pembangunan Kewilayahan, Kesehatan, Sosial, Hukum & Keamanan, Pendidikan, & **Pemerintahan Umum**

Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional



Layanan Administrasi Pemerintahan di bidang Keuangan Negara

Penyelenggaraan layanan manajemen data keuangan negara sesuai kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan Big Data dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah untuk data keuangan negara



Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Informasi Pemerintahan

Penyelenggaraan operasionalisasi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung layanan pemerintah dan komputasi awan untuk dukungan operasional Aplikasi Umum SPBE



Layanan Administrasi Pemerintahan di Bidang Riset dan Inovasi

Penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan di bidang riset dan inovasi pemerintah, termasuk di dalamnya pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi digital pemerintah, serta mendukung penerapan Big Data dan Kecerdasan Artifisial pemerintah, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintah



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional



Layanan Infrastruktur SPBE Terintegrasi

- | Penyelenggaraan operasionalisasi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan komputasi awan untuk dukungan operasional Aplikasi Umum SPBE



Layanan Keamanan SPBE Terintegrasi

- | Penyelenggaraan asistensi penerapan keamanan SPBE dan penanganan permasalahan keamanan SPBE, pemberian rekomendasi kelaikan keamanan SPBE dan Audit Keamanan SPBE pada Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional

RELASI PADA DUKUNGAN TIK TERINTEGRASI



19 INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

HINGGA 2024



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional
& Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

RELASI PADA KERANGKA **SATU DATA INDONESIA**



Layanan Manajemen Data Statistik

Penyelenggaraan layanan manajemen data statistik dalam bentuk sistem infrastruktur statistik nasional yang berbagi pakai dalam rangka mendukung big data pemerintah, Satu Data Indonesia, dan sistem statistik nasional.



Layanan Manajemen Data Geospasial

Penyelenggaraan layanan manajemen data geospasial sesuai kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan Big Data dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah untuk data geospasial



Layanan Manajemen Data Keuangan

Penyelenggaraan layanan manajemen data keuangan negara sesuai kerangka kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan Big Data dan Kecerdasan Artifisial Pemerintah untuk data keuangan negara

Layanan data terpadu secara nasional, akan signifikan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan keputusan (*Data-Driven Policy*)

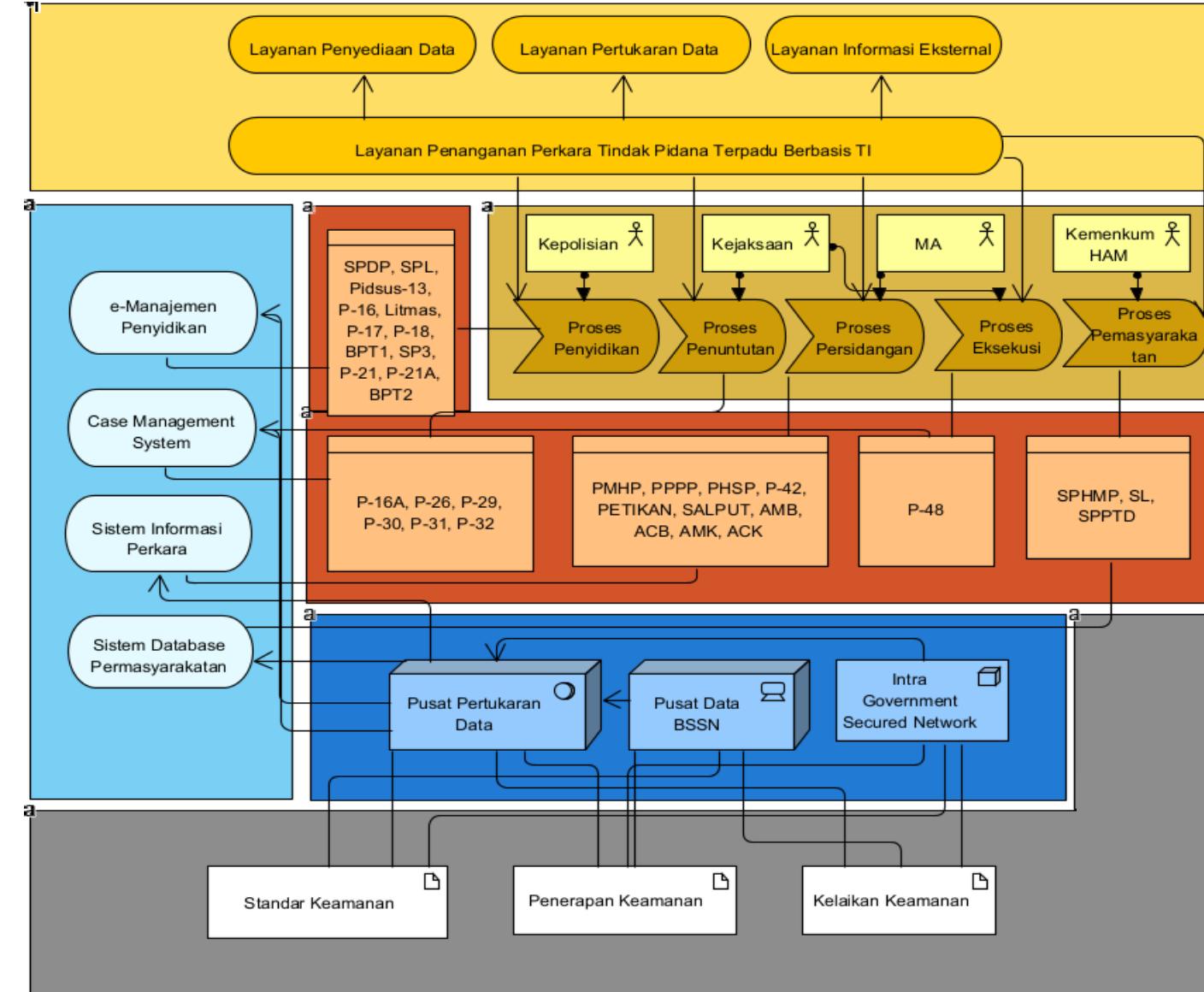
Mendukung penerapan RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan Layanan Administrasi Pemerintah) melalui konsolidasi data terpadu



Layanan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

MELALUI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE



Sinergi untuk Indonesia Maju



Sinergi untuk Indonesia Maju



TERIMA KASIH

“Sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait sangat menentukan keberhasilan penerapan SPBE.”



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif